

ABSTRAK

Gina Purnamasari: *Implementasi Prosedur Izin Usaha Toko Modern Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2011.*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2011, untuk mendirikan toko modern wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) serta mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan pemerintah guna melindungi kepentingan umum, dan penjaminan kepastian hukum, namun pada fakta dilapangan, masih banyak usaha toko modern yang tidak memiliki IUTM, tercatat 49 dari 268 toko modern yang tidak memiliki IUTM berdasarkan Data dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tujuan Penelitian ini adalah Pertama, untuk mengkaji dan mengetahui langkah-langkah Pelaksanaan Prosedur Izin Usaha Pendirian Toko Modern menurut Perda No. 21 Tahun 2011 di Kabupaten Bandung Barat. Kedua, untuk mengetahui dan mengkaji penyebab pelanggaran dalam memenuhi prosedur izin usaha toko modern. Ketiga, untuk mengetahui penegakan sanksi hukum yang melanggar Perda Kabupaten Bandung Barat No. 21 Tahun 2011 di tinjau dari *Siyasah Dusturiyah*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif, dimana Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data serta menggambarkan kandungan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang memerhatikan hukum dan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data Primer dan Sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik Observasi, wawancara, studi kepustakaan dan catatan dilapangan.

Berdasarkan Hasil dari Penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang prosedur izin usaha penerapan telah dilakukan dengan berbagai upaya oleh DPMTSP Kabupaten Bandung Barat, melalui sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat agar terciptanya kesadaran administratif, namun penerapan tersebut belum memaksimalkan berbagai aspek yang harus terpenuhi dalam teori, dalam penerapan Perda tersebut masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya memperoleh IUTM, tidak terpenuhinya persyaratan yang tertib administratif. Dalam upaya menegakan sanksi hukum yang melanggar, penindakan peraturan dan pemerintah memenuhi prinsip-prinsip penegakan hukum dalam *Siyasah Dusturiyah*.

Kata kunci:

Prosedur IUTM, Toko Modern, Perizinan, *Siyasah Dusturiyah*.